BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam semata-mata bukanlah hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial. Di samping itu perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. ar-Rūm: 21)[1]

Terkait dengan ayat di atas, maka amatlah tepat jika KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miṡāqan galīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI pasal 2). Oleh karena itu, perkawinan yang sarat akan nilai dan bertujuan

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia harus diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.[2]

Islam telah menetapkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan untuk tercapainya perkawinan yang sah sesuai syara'. Tidak cukup itu, di Indonesia supaya perkawinan itu sah di mata negara, maka perkawinan itu harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang merupakan pengembangan hukum perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban UU Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas untuk orang Islam.[3]

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.[4] Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.[5]

---

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 1997), 70.

[3] *Ibid.*, 57.

[4] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahāt: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12.

[5] Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Adapun yang dimaksud rukun dalam perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu. Apabila salah satu syarat perkawinan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.[6] Rukun dan syarat perkawinan itu menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, sehingga rukun dan syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Penentuan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, wali dari pihak wanita, dua orang saksi dan *ṣīgat* akad nikah (ijab kabul).[7] Sedangkan syarat perkawinan itu adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul.[8] Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan timbullah hak dan kewajiban sebagai suami istri.

---

[6] *Ibid.,* 30.

[7] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006), 46-47.

[8] Sa'īd bin Abdullāh bin Thālib al Hamdanī, *Risālah al-Nikāh* , terjemahan, Agus Salim, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syāfi'ī dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun,[9] yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan kabul.[10]

Syarat perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak sama persis dengan syarat-syarat perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern merupakan syarat yang harus ada pada para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam melaksanakan perkawinan.[11] Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ekstern adalah syarat yang berhubungan dengan cara atau formalitas pelangsungan perkawinan.[12]

---

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2009), 61.

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. I, 2008), 5.

[11] A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan,* (Surabaya: Diantama, 2007), 25.

[12] *Ibid.*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ternyata belumlah cukup untuk mengakomodir masalah-masalah perkawinan yang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan munculnya kebijakan-kebijakan khusus sebagai upaya memecahkan problem yang terjadi dimasyarakat. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan pokok yang sudah ada (*lex superior derogat lex inferior*).

Penelitian kali ini adalah mengenai kebijakan KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang mewajibkan tes urine bagi calon mempelai wanita. Kebijakan ini berawal dari keprihatinan masyarakat terhadap maraknya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja yang sering berdampak pada kehamilan di luar nikah. Fenomena tersebut lambat laun menjadi sebuah permasalahan di kalangan masyarakat yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, KUA kecamatan Paciran berinisiatif untuk membuat kebijakan baru sebagai respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus kawin hamil yang tidak lain disebabkan kehamilan di luar nikah.

Bahkan berdasarkan pengamatan sementara, fenomena kawin hamil di wilayah kecamatan Paciran meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut keterangan pegawai KUA kecamatan Paciran, pada tahun-tahun sebelumnya KUA kecamatan Paciran hampir tidak pernah menangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus kawin hamil, kalaupun hal itu ada, kemungkinan cuma satu sampai dua kasus kawin hamil dalam satu tahun. Sedangkan akhir-akhir ini KUA kecamatan Paciran hampir tiap bulan menangani kasus kawin hamil, bahkan yang lebih parah kasus kawin hamil yang ditangani dalam satu bulan terkadang lebih dari dua kasus.[13]

Beragam pendapat seputar kawin hamil terkadang menimbulkan suatu kebingungan, apalagi jika dihadapkan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam dengan kebutuhan dan permasalahan yang sangat beragam pula. Hal tersebut yang mendorong pemuka negara ini untuk merumuskan kitab fikih versi Indonesia dalam suatu bentuk kesatuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu materi pokok dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kawin hamil. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang inti dari pasal tersebut adalah kebolehan menikahi wanita dalam keadaaan hamil dan tidak perlu menunggu sampai kelahiran anak, serta tidak dibutuhkan pengulangan akad perkawinan setelah anak yang dikandung lahir. Namun, kebolehan menikahi wanita hamil yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) terbatas pada laki-laki yang menghamili wanita tersebut. Sedangkan KHI tidak memberikan alternatif jawaban terhadap kawin hamil jika kasusnya yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang bukan menghamilinya.

---

[13] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 18 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi *ikhtilāf* dalam ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis.Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istiṣlaḥ*. Sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilāf* dan '*urf*, perumus KHI berpendapat lebih besar *maṣlaḥat* membolehkan kawin hamil daripada melarangnya. Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang berada dalam kandungan. [14]

Lebih lanjut, pegawai KUA kecamatan Paciran menjelaskan bahwa tes urine tersebut dilakukan dalam rangka mengetahui dan menentukan suatu keputusan hukum tentang status calon pengantin wanita apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak, dan sebagai langkah *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan ketentuan yang sudah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 53 tentang kawin hamil. Bentuk kehati-hatian tersebut adalah dalam rangka melindungi nasab anak dan pertanggungjawaban calon suami atas perbuatan yang telah dilakukannya.[15]

Berkenaan dengan pelaksanaan tes urine, KUA kecamatan Paciran bekerja sama dengan puskesmas Paciran. Puskesmas Paciran mempunyai

---

[14] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grfika, Cet. V, 2009), 42.

[15] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 18 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responsibilitas penuh dalam hal proses pelaksaan dan teknisnya. Selain diwajibkan tes urine, para calon pengantin wanita di wilayah kecamatan Paciran juga diharuskan untuk cek kesehatan dan suntik TT (*tetanus toxoid*) sebelum melaksanakan perkawinan. Kewajiban tes urine inilah yang membedakan KUA kecamatan Paciran dengan KUA kecamatan lain, khususnya di wilayah kabupaten Lamongan. Walaupun tes urine tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan KUA kecamatan Paciran, akan tetapi mengenai seluruh biayanya ditanggung oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Proses pendaftaran bagi calon mempelai wanita yang dinyatakan positif hamil berdasarkan dari hasil tes urine tersebut, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh PPN adalah pengambilan sumpah dari masing-masing mempelai bahwa kehamilan tersebut adalah hasil dari perbuatan keduanya. Jika menurut pengakuan keduanya, anak yang dikandung itu adalah hasil perbuatan mereka, maka PPN bersedia mencatatkan perkawinan tersebut. Namun, jika kehamilan tersebut bukanlah hasil perbuatan laki-laki yang hendak menikahi wanita tersebut, maka PPN menolak mencatatkan perkawinan keduanya.[16]

Terkait dengan dijadikannya hasil tes urine sebagai persyaratan dalam perkawinan di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupten Lamongan, maka setiap calon pengantin wanita, baik perawan atau janda wajib melakukan tes urine tanpa terkecuali. Apabila calon pengantin wanita tersebut tidak mau

[16] Mudlofar, *Wawancara*, Paciran, 18 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN ... AGAMA SURABAYA ... AMPEL

melakukan tes urine, maka konsekuensinya adalah PPN akan mempersulit proses pendaftaran dan pemeriksaan kedua calon mempelai.

Secara substansi, ditetapkannya kebijakan tersebut adalah suatu hal yang positif, akan tetapi menjadikan tes urine tersebut sebagai persyaratan wajib dalam perkawinan, dirasa memberatkan calon pengantin karena adanya pembebanan lebih dari segi biaya administrasi dan proses pendaftaran perkawinan, yang mana dalam Islam maupun undang-undang, kewajiban tes urine itu tidak syaratkan dalam sebuah perkawinan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan KUA kecamatan Paciran tersebut dengan judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka ditemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Definisi syarat dan rukun dalam perkawinan.
2. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut fiqh, undang-undang perkawinan, dan KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan rukun dalam perkawinan di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.
4. Sebab atau faktor timbulnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.
5. Tujuan diadakannya kewajiban tes urine di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupten Lamongan.
6. Hikmah diwajibkannya tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.
7. Implikasi atau akibat hukum kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.
8. Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa poin atau masalah yang perlu dibatasi dalam penelitian ini agar fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu melebar. Adapun poin tersebut antara lain:

1. Sebab timbulnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamtan Paciran kabupaten Lamongan .
2. Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa timbul kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya. Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang sedang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui berbagai media, belum pernah ditemukan literatur atau karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang tes urine dalam kaitannya dengan perkawinan. Namun, ada beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini, sebab salah satu tujuan diwajibkannya tes urine bagi calon pengantin wanita dalam penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menekan kasus kawin hamil yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, khusunya yang banyak terjadi di kalangan remaja. Diantara buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah:

1. "*Married by Accident*" karya M. Iqbal al-Haetami.[17] Buku ini secara garis besar berisi tentang dunia remaja dan seksualitas, zina dan segala permasalahannnya yang sekaligus disajikan dengan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama.
2. "Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah" karya Gatot Supramono.[18] Buku ini membahas tentang hubungan luar nikah mulai dari bentuk, faktor pendorong, permasalahan yang timbul, akibat hukum, dan upaya penanggulangan hubungan luar nikah. pembahasan dalam buku ini lebih mengacu KUHP dan hukum adat.
3. "Dewasa Muda" karya Agoes Dariyo. [19] Buku karangan Dariyo ini menyajikan lebih detail tentang perkembangan pada masa transisi remaja, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, dan psikosial, termasuk juga pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan remaja, pernikahan dan perceraian.

Selain beberapa buku di atas, ada beberapa karya ilmiah yang materinya berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

---

[17] M. Iqbal al-Haetami, *Married by Accident,* (Jakarta: Qultum Media, Cet. I, 2004).

[18] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah,* (Jakarta: Djambatan, 1998).

[19] Agoes Dariyo, *Dewasa Muda,* (Jakarta: Grasindo, Cet. II, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Charis Camdi yang berjudul "Analis Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin". [20] Skripsi tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin, maka setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin (SUSCATIN) sebagai syarat wajib dalam perkawinan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diperoleh dari mengikuti kursus tersebut. Suscatin ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat di masyarakat sehingga tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Maziyyatul Hikmah dengan judul "Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *Sadd al-Żarī'ah* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)".[21] Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti, yaitu faktor yang menjadi penyebab adanya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di desa Mojorejo kecamatan Junrejo kota Batu serta penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode *sadd al-żarī'ah.* Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adanya

---

[20] Moch. Charis Chamdi, *Analis Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

[21] Maziyyatul Hikmah, *Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode Sadd al-żarī'ah (Studi di Desa Mojorejo kecamatan Junrejo kota Batu),* Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil di desa Mojorejo kecamatan Jonrejo kota Batu disebabkan tingginya angka kasus hamil di luar nikah, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir fenomena hamil di luar nikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Nur Syifa yang berjudul "Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam".[22] Yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan kawin hamil di KUA kecamatan Imogiri, karena di KUA sendiri masih ada beberapa permasalahan mengenai kawin hamil tersebut, apakah pelaksanaanya sudah sah atau sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Kemudian faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan hamil tersebut serta implikasi kawin hamil tersebut terhadap kehidupan rumah tangga.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pada dasarnya adalah tentang sebuah kebijakan yang menjadikan tes urine sebagai syarat wajib dalam perkawinan. Namun, latar belakang atau faktor yang menyebabkan ditetapkannya kebijakan tersebut adalah maraknya fenomena hamil di luar nikah yang berakibat pada naiknya prosentase pelaksanaan kawin hamil.

---

[22] Muh. Nur Syifa, *Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam,* Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, masih ada keterkaitan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Titik perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajiannya. Objek kajian dalam penelitian ini lebih dititik beratkan pada latar belakang sebuah kebijakan tentang kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang dijadikan syarat wajib tambahan dalam perkawinan di wilayah tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan latar belakang diwajibkannya tes urine bagi calon pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Dalam aspek teoritis (keilmuan), hasil penilitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti secara pribadi maupun pembaca. Lebih lanjut, penelitian ini nantinya diharapkan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan bahan acuan bagi peneliti yang hendak mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dalam aspek praktis (terapan), diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan KUA kecamatan lain yang hendak mewajibkan tes urine bagi setiap calon pengantin wanita di wilayahnya sebagai salah satu persyaratan nikah dan salah satu upaya untuk menekan angka kasus hamil di luar nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari materi yang akan dijelaskan dalam skripsi ini, maka diperlukan pendefinisian dari setiap variabel yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

1. Analisis Hukum Islam: penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan dengan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam yang dimaksud dalam penilitian ini adalah pendapat *fuqahā'* yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kewajiban Tes Urine: sebuah penetapan yang dibuat oleh KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, dimana setiap calon pengantin wanita wajib melakukan tes urine di puskesmas Paciran sebagai salah satu persyaratan perkawinan di wilayah KUA tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Calon Pengantin Wanita: setiap wanita yang hendak melangsungkan pernikahan di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, baik statusnya perawan maupun janda.
4. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Paciran kabupaten Lamongan: instansi Kementerian Agama Republik Indonesia di kecamatan Paciran yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten Lamongan di bidang pencatatan perkawinan yang menjadikan tes urine sebagai kewajiban bagi setiap calon pengantin wanita yang melangsungkan pernikahan di wilayah KUA tersebut.

Berdasarkan definisi operasional yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" terbatas pada pembahasan mengenai tes urine bagi calon pengantin wanita yang dijadikan persyaratan dalam perkawinan di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, yang kemudian akan dianalisa dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan penelitian yang membahas tentang kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan adalah:

a. Data tentang latar belakang atau sebab timbulnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan;
b. Data tentang pelaksanaan dan tujuan diwajibkannya tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan;
c. Data tentang hasil tes urine calon pengantin wanita yang diperoleh dari puskesmas Paciran yang dinyatakan positif (hamil) dan negatif (tidak hamil);

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data itu dapat diperoleh.[23] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder:

a. Sumber Primer

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. V, 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang bersifat utama dan penting guna mendaptkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber primer dapat diperoleh melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.[24] Sumber primer dalam penelitian ini adalah para responden yang terdiri dari:

1) Kepala dan pegawai KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.
2) Pengantin wanita yang pernah melakukan tes urine.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel.[25] Salah satu kegunaan sumber sekunder adalah memberikan semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.[26]

Sumber skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah dokumen resmi yang berupa berkas atau arsip di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang terkait dengan kewajiban tes urine. Selain itu Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai salah satu

---

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 36.

[25] Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Cet. IV, 1995), 85.

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pijakan oleh KUA kecamatan Paciran dalam menetapkan kebijakan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara: yaitu proses memperoleh informasi atau keterangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[27] Dalam penelitian ini, yang dijadikan responden adalah kepala dan pegawai KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita dan petugas laboratorium puskesmas Paciran yang bekerja sama dengan KUA kecamatan Paciran dalam pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin wanita, serta pengantin wanita yang sudah pernah melaksanakan tes urine di puskesmas Paciran.

b. Observasi: yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke puskesmas Paciran berkaitan dengan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin wanita.

---

[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi: dengan cara mengumpulkan, kemudian menelaah data yang didapat dari dokumen resmi KUA kecamatan Paciran baik berupa arsip, laporan, maupun catatan yang berkaitan dengan kebijakan yang mewajibkan tes urine bagi calon pengantin wanita di KUA tersebut.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. [28] Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dengan metode ini, penelitian ini berusaha memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan tentang kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA tersebut, sehingga diketahui sebab-sebab timbulnya kewajiban tersebut untuk selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam dengan pola pikir deduktif.

---

[28] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XXVI, 2009), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian ini membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar penilitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat tentang syarat dan rukun dalam perkawinan menurut *fuqahā'*, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pandangan *fuqahā'*, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang isinya meliputi gambaran umum KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang memuat beberapa materi tentang kondisi geografis KUA, visi dan misi KUA, struktur kepengurusan KUA Kemudian juga membahas tentang latar belakang atau sebab timbulnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dan implikasi dari kewajiban tes urine di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat adalah analisis data. Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini, yaitu menerangkan tentang analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

Bab kelima yang merupakan penutup dari keempat bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id